



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK TAHUN 2024**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penghargaan kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan inovasi di dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada institusinya;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi atas laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan dokumen laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Tahun 2023, telah tersusun Daftar Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK TAHUN 2024.**

**KESATU...**

- KESATU** : Menetapkan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2024 untuk kinerja pengelolaan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan dan hasil evaluasi atas 7 (tujuh) aspek yang meliputi:
1. Organisasi;
  2. Sumber Daya Manusia;
  3. Koleksi Dokumen Hukum;
  4. Teknis Pengelolaan;
  5. Sarana Prasarana;
  6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  7. Promosi dan Inovasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri terkait;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait;
5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
6. Para Gubernur terkait;
7. Para Bupati terkait;
8. Para Walikota terkait;
9. Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota terkait;
10. Para Rektor Universitas terkait.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-4.HN.03.05 TAHUN 2024

Tanggal : 14 Agustus 2024

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN  
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TERBAIK  
TAHUN 2024**

NO.	KATEGORI PENGHARGAAN	KETERANGAN
I.	<b>KATEGORI UMUM (PENGELOLAAN JDIH)</b>	
<b>Tingkat Kementerian</b>		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terbaik I
2.	Kementerian Sosial	Terbaik II
3.	Kementerian Ketenagakerjaan	Terbaik III
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terbaik IV
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terbaik V
<b>Tingkat Lembaga Negara</b>		
1.	Mahkamah Agung	Terbaik I
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	Terbaik II
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	Terbaik III
4.	Ombudsman Republik Indonesia	Terbaik IV
5.	Dewan Perwakilan Daerah	Terbaik V
<b>Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian</b>		
1.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Terbaik I
2.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Terbaik II
3.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Terbaik III
4.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terbaik IV
5.	Badan Narkotika Nasional	Terbaik V
<b>Tingkat Lembaga Non-Struktural</b>		
1.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Terbaik I
2.	Komisi Aparatur Sipil Negara	Terbaik II
3.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	Terbaik III
<b>Tingkat Provinsi</b>		
1.	Provinsi Bali	Terbaik I
2.	Provinsi Jawa Barat	Terbaik II
3.	Provinsi Jawa Tengah	Terbaik III
4.	Provinsi Banten	Terbaik IV
5.	Provinsi Jawa Timur	Terbaik V

<b>Tingkat Kabupaten</b>		
1.	Kabupaten Banyuwangi	Terbaik I
2.	Kabupaten Sukoharjo	Terbaik II
3.	Kabupaten Batang	Terbaik III
4.	Kabupaten Tegal	Terbaik IV
5.	Kabupaten Semarang	Terbaik V
6.	Kabupaten Mimika	Terbaik VI
7.	Kabupaten Magelang	Terbaik VII
8.	Kabupaten Wonosobo	Terbaik VIII
9.	Kabupaten Bandung Barat	Terbaik IX
10.	Kabupaten Sleman	Terbaik X
<b>Tingkat Kota</b>		
1.	Kota Denpasar	Terbaik I
2.	Kota Tanjung Pinang	Terbaik II
3.	Kota Tangerang	Terbaik III
4.	Kota Yogyakarta	Terbaik IV
5.	Kota Batam	Terbaik V
<b>Tingkat Sekretariat DPRD Provinsi</b>		
1.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Terbaik II
3.	Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik III
<b>Tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten</b>		
1.	Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	Terbaik II
3.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang	Terbaik III
<b>Tingkat Sekretariat DPRD Kota</b>		
1.	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Kota Semarang	Terbaik II
3.	Sekretariat DPRD Kota Surakarta	Terbaik III
<b>Tingkat Perguruan Tinggi</b>		
1.	Institut Teknologi Bandung	Terbaik I
2.	Universitas Tidar	Terbaik II
3.	Universitas Lampung	Terbaik III
<b>II.</b>	<b>KATEGORI KHUSUS (PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN JDIH TERBAIK PADA ZONA WILAYAH INDONESIA)</b>	
<b>Tingkat Provinsi</b>		
	Provinsi Sumatera Utara	
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	Provinsi Papua Barat Daya	

<b>Tingkat Kabupaten</b>	
	Kabupaten Jember
	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	Kabupaten Halmahera Barat
<b>Tingkat Kota</b>	
	Kota Jakarta Barat
	Kota Makassar
	Kota Ternate
<b>Tingkat DPRD Provinsi</b>	
	DPRD Provinsi Jawa Timur
	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
<b>Tingkat DPRD Kabupaten</b>	
	DPRD Kabupaten Cianjur
	DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
<b>Tingkat DPRD Kota</b>	
	DPRD Kota Salatiga
	DPRD Kota Banjarmasin

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YASONNA H. LAOLY